

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Babak akhir pemerintahan orde lama¹ adalah periode demokrasi terpimpin². Demokrasi terpimpin lahir karena kegagalan kabinet Djuanda³ yang mengakibatkan pertentangan politik maupun ideologi dalam pemerintahan yang kemudian muncullah suatu konsepsi dari Presiden Soekarno yaitu “demokrasi terpimpin”. Untuk melaksanakan konsepsi dari Presiden Soekarno tersebut, Djuanda mengusulkan untuk “kembali ke Undang-Undang Dasar 1945”. Pokok-pokok pikiran dalam UUD 1945 kembali diberlakukan dan ditambah dengan beberapa poin-poin penting. Usul dari Djuanda pun diterima oleh Presiden Soekarno yang kemudian Presiden membicarakan masalah tersebut dengan Mr. Moh Yamin, Mayjen Nasution dan Dr. Lemeina. Usul dari Djuanda tersebut juga disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Menteri kabinet, dan juga partai-partai besar seperti PNI (Partai Nasional Indonesia), NU (Nathadul Ulama), Masyumi, serta partai-partai kecil lainnya.

¹ Orde Lama dalam sejarah politik indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno (1945-1965). Istilah ini baru dicetuskan ketika pemerintahan Soeharto atau disebut juga Orde Baru yang merupakan pemerintahan setelah Orde Lama.

² Demokrasi Terpimpin merupakan sebuah bentuk pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi.

³ Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir periode demokrasi parlementer. Demokrasi Parlementer merupakan periode pemerintahan sebelum Demokrasi Terpimpin.

Keadaan konstituante yang carut marut karena tidak ditemukannya mayoritas suara dalam pemungutan suara mengakibatkan ketegangan politik dalam konstituante yang mengakibatkan konstituante harus dibubarkan. Pembubaran konstituante ditakutkan dapat mengakibatkan carut marutnya keadaan dalam masyarakat. Maka dari itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang ditandatangani pada 5 Juli 1959. Dekrit presiden 5 Juli 1959 mengubah secara mendasar struktur tata pemerintahan negara. Dekrit tersebut memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS. Sedangkan kabinet presidensial pertama adalah kabinet Karya yang disertai dengan pembentukan departemen-departemen baru dalam pemerintahan. Perubahan struktur negara juga mengakibatkan perubahan dalam struktur organisasi Kepolisian Negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bidang pertahanan dalam negeri yang sudah ada sejak lama. Kepolisian sudah ada sejak jaman Hindia-Belanda, namun pada saat itu terdapat perbedaan antara polisi pribumi dengan polisi Belanda. Jaman Jepang jumlah polisi pribumi lebih banyak dari pada jaman Hindia-Belanda, bahkan setiap kantor polisi dikepalai oleh seorang polisi pribumi namun tetap didampingi oleh polisi senior Jepang.⁴ Militerisasi dalam Angkatan Kepolisian sudah dilakukan sejak masa Jepang, namun dalam periode Demokrasi Terpimpin militerisasi lebih ditegaskan dengan Keputusan Presiden yang tertera dalam

⁴ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. *Almanak Seperempat Abad Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. 1970, hlm. 177.

Lembaran Negara Republik Indoesia No. 160, 1960.⁵ Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, lahir pula “*Polisi Pedjoang*” yang ikut serta dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, polisi bersama dengan masyarakat saling membantu dalam menjaga keamanan negara.

Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam perjalannya mengalami perubahan dalam organisasi, status, fungsi maupun tugasnya. Fungsi maupun peran serta kepolisian pada masa Demokrasi terpimpin dalam keamanan negara sangatlah luas. Polri berperan dalam operasi Kamdagri yaitu operasi penumpasan DI/TII di Sulawesi maupun di Jawa Barat. Selain itu dalam operasi Trikora dan Dwikora, sebagai anggota ABRI Polri juga berperan dalam operasi tersebut. Polri juga bertugas melindungi Presiden pada masa demokrasi terpimpin. Dan di pertengahan tahun 1965 ketika meletusnya pemberontakan G30S, Polri berperan dan berfungsi untuk andil dalam penumpasan pemberontakan tersebut.⁶

Perkembangan Kepolisian Negara pada masa demokrasi terpimpin dapat dimulai ketika berakhirnya masa jabatan R.S Soekanto. Lahirnya UU Pokok tentang Kepolisian No. 13/1961 serta perkembangan P3RI dan kekaryaan Polri juga berlangsung pada masa demokrasi terpimpin. Dan yang paling tenterorot dalam

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia. *Militerisasi Kepolisian Negara*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. 1960, hlm. 834.

⁶ Awaloedin Djamin. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI. 2007, hlm. 274.

perkembangan Kepolisian negara pada masa ini adalah Integrasi Kepolisian ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang berjudul “ Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)” maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum demokrasi terpimpin?
2. Bagaimana gambaran umum Kepolisian Negara Republik Indonesia masa demokrasi terpimpin?
3. Bagaimana dinamika dan perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia masa demokrasi terpimpin?
4. Peran apa saja yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia masa demokrasi terpimpin ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan Karya Ilmiah ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

⁷*Ibid*, hlm. 296.

- a. Sebagai sarana untuk mengembangkan daya berfikir kritis, logis, dan analisis.
 - b. Sebagai sarana efektif untuk mengaplikasikan metodologi penelitian sejarah.
 - c. Melatih daya kritis objektif dan analisis dalam penulisan karya sejarah serta kepekaan pada peristiwa masa lampau untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk melangkah ke masa depan.
 - d. Meningkatkan disiplin intelektual terutama dalam bidang sejarah.
 - e. Sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Tujuan Khusus
- a. Mengetahui gambaran umum Kepolisian Republik Indonesia sebelum Demokrasi Terpimpin.
 - b. Mengetahui gambaran umum Kepolisian Negara Republik Indonesia masa Demokrasi Terpimpin.
 - c. Mengetahui dinamika dan perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia masa demokrasi terpimpin.
 - d. Mengetahui peran-peran militer Kepolisian Negara Republik Indonesia masa demokrasi terpimpin.

D. Manfaat Penulisan

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pembaca

- a. Pembaca memperoleh pengetahuan tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin
- b. Menambah wawasan dan pemahaman tentang gambaran umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin.
- c. Pembaca memperoleh pengetahuan tentang sejarah militer khususnya Kepolisian Republik Indonesia masa Demokrasi Terpimpin.
- d. Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi penulisan karya ilmiah selanjutnya.

2. Bagi Penulis

- a. Memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.
- b. Sebagai tolak ukur ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didapat selama proses perkuliahan berlangsung.
- c. Dalam penulisan skripsi ini, penulis dapat memperoleh pengetahuan melalui bahan-bahan yang dikumpulkan guna mendukung penggarapan skripsi ini. Selain itu diharapkan penulis dapat berpikir lebih kritis dan objektif dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada.
- d. Penulis memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang “Peran Kepolisian Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)”

E. Kajian Pustaka

Penelitian Sejarah merupakan bentuk pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah menjadi masa lampau.⁸ Penulisan karya ilmiah diperlukan kajian pustaka. Hal ini dimaksudkan supaya peneliti dapat memperoleh data-data ataupun informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai permasalahan yang dikaji. Kajian pustaka atau teori merupakan telaah terhadap pustaka yang menjadi landasan pemikiran.⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa litelatur sebagai bahan kajian pustaka.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan kajian pustaka dari buku yang berjudul “*Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari Jaman Kuno sampai Sekarang*” yang ditulis oleh Jenderal Polisi Prof. DR. Awaloedin Djamin, MPA dan diterbitkan dan dicetak oleh Yayasan Brata Bhakti POLRI pada tahun 2007. Dalam buku ini sudah terdapat gambaran keseluruhan peran kepolisian negara republik Indonesia masa demokrasi terpimpin. Sehingga dalam masing-masing bab yang akan dibahas oleh penulis menggunakan buku karangan Awaloedin Djamin. Selain buku yang dilutis Awaloedin Djamin, penulis juga menggunakan buku yang berjudul “*Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*”

⁸Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1993, hlm. 19.

⁹Jurusan Pendidikan Sejarah. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY. 2006, hlm. 3.

yang ditulis oleh Irdjen Pol Memet Tanuwidjaja, S.H yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan Puat Sejarah ABRI tahun 1971.

Rumusan masalah yang pertama adalah membahas tentang Kepolisian Republik Indonesia Sebelum Masa Demokrasi Terpimpin. Dalam rumusan masalah yang pertama ini selain menggunakan buku dari Awaloedin Djamin penulis juga menggunakan buku yang ditulis oleh Soeparno yang berjudul “*Sejarah Perkembangan Kepolisian Jaman Klasik-Modern*” oleh pusat sejarah ABRI di Jakarta tahun 1871. Dalam buku ini dijelaskan bahwa perkembangan sejarah Kepolisian dari masa klasik sampai modern. Gambaran Kepolisian Republik Indonesia masa demokrasi terpimpin diawali setelah lahirnya dekrit presiden 5 Juli 1959 yang merupakan awal pertanda demokrasi terpimpin dimulai. Kepolisian mengalami perubahan dalam struktur organisasi, fungsi dan peran maupun tugasnya karena adanya perubahan sistem pemerintahan Indonesia.

Pada rumusan masalah yang kedua yang membahas tentang gambaran umum Kepolisian Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara). Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekarto menyampaikan keberatannya dengan

alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.¹⁰ Selain menggunakan buku yang ditulis oleh Awaloedin Djamin, penulis menggunakan buku yang ditulis oleh Sundhaussen yang berjudul “*Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI*” diterbitkan oleh LP3JES di Jakarta pada tahun 1986 .

Rumusan masalah yang ketiga membahas tentang dinamika perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia masa demokrasi terpimpin. Polri sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai penegak hukum dan keamanan negara serta pengayom masyarakat. Dinamika perkembangan Kepolisian Negara ditunjukkan dengan adanya UU Pokok Kepolisian RI No. 13 tahun 1960, perubahan struktur organisasi Kepolisian, dan Perubahan Mobiele Brigade menjadi Brigade Mobil. Dalam permasalahan ini penulis menggunakan buku dari Erma Yulihastin berjudul “*Bekerja Sebagai Polisi*” diterbitkan oleh Erlangga di Jakarta tahun 2008 dan Adrianus Meliala yang berjudul ‘*Mengkritisi*

¹⁰Awaloedin Djamin, *op.cit.* hlm. 304.

Polisi” diterbitkan oleh Kanisius di Yogyakarta tahun 2001. Buku kaarangan Mochtar Lubis yang berjudul “*Citra Polisi*” diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia di Jakarta tahun 1988 juga melengkapi penulis dalam menyusun dan memecahkan permasalahan pada rumusan masalah terakhir.

Rumusan masalah yang keempat membahas tentang peranan Kepolisian Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin. Masa demokrasi terpimpin Polri berperan banyak dalam upaya keamanan negara. Polri berperan Polri berperan dalam operasi terhadap DI/TII di Sulawesi tahun 1962-1965 dan Jawa barat tahun 1959-1962. Dalam operasi Trikora yang memperebutkan wilayah Irian Barat, Polri yang merupakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melakukan tugas dan peranannya untuk mengamankan negara. Selain operasi DI/TII dan Trikora, Polri juga andil dalam operasi Dwikora dan operasi penumpasan G30S. Beberapa permasalahan diatas terdapat dalam buku yang diulis oleh Awaloedin Djamin

F. Historiografi Yang Relevan

Menurut Kuntowijoyo, historiografi merupakan rekonstruksi masa lalu.¹¹ Historiografi yang relevan adalah karya-karya tulis ilmiah yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan pembahasan dengan penelitian yang akan diajukan, maka fungsi dan kedudukan historiografi yang relevan telah ada dengan yang akan digarap adalah menyempurnakan dan mengisi kekurangan, memperluas penelitian yang telah ada, menyumbangkan studi kasus yang baru secara lebih tuntas, serta

¹¹Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka. 1999, hlm. 18.

dapat juga membantah atau menolak teori juga pemikiran yang telah ada, melakukan reinterpretasi pada masalah-masalah yang tidak perlu.¹²

Historiografi yang relevan merupakan rekonstruksi imaginatif dari masa lampau berdasarkan data-data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman atau peninggalan masa lampau. Sebagai bagian dari proses untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau, peranan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sangat penting untuk dilakukan.

Historiografi yang relevan dapat berupa buku, desertasi, tesis, maupun skripsi yang kevalidannya dapat dipertanggjawabkan. Dalam penulisan sejarah, penggunaan historiografi yang relevan merupakan hal yang pokok sebelum melakukan penulisan sejarah. Maksud dari historiografi yang relevan adalah untuk dapat membedakan karya-karya ilmiah sejarah yang telah ada sebelumnya.

Penelitian tentang Kepolisian Republik Indonesia sudah banyak yang menulis. Beberapa dari para sejarawan atau ilmuwan sosial dan angkatan kepolisian. Skripsi yang ditulis Bayu Saptana, Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang berjudul “Peralihan AKRI ke POLRI: Sebuah Analisi Historis (1966-1976)” membahas tentang mengapa masa Orde Baru AKRI beralih menjadi POLRI. Selain itu skripsi yang ditulis Koidah, Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negei Yogyakarta (UNY) yang berjudul “Sekolah Darurat Polisi Di Sendang Agung Pada Masa Agresi Militer Belanda II (1948-

¹²Daliman. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2012, hlm. 46.

1949)" yang membahas tentang keberadaan sekolah darurat Polisi di Sendang Agung pada masa agresi militer Belanda II.

Skripsi karya Ferli Permatasari yang berjudul Korps Kepolisian Republik Indonesia di Yogyakarta (1946-1949), Program Studi Sejarah Universitas Andalas, Padang tahun 2006. Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan tugas Korps Kepolisian Republik Indonesia di Yogyakarta bersama-sama dengan tentara dalam rangka menghadapi serangan dari Belanda baik Agresi Militer Belanda I dan II.

G. Metode Penelitian

Menurut Kuntowijoyo, terdapat lima tahap dalam proses penelitian sejarah, terdiri dari tahap Pemilihan Topik, Heuristik (Pengumpulan Sumber), Verifikasi (Kritik Sumber), Interpretasi dan Penulisan Sejarah (historiografi, penjelasan, penyajian).¹³

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan langkah awal dalam penelitian untuk menentukan permasalahan yang hendak dikaji. Dalam penelitian, topik harus dipilih berdasarkan kedekatan intelektual dan kedekatan emosional.¹⁴ Dua syarat ini sangat penting, karena orang hanya akan bekerja dengan baik jika dia senang. Hal ini diperlukan agar dapat mendalami permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Masa Demokrasi

¹³Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2003, hlm. xix.

¹⁴Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*,. op.cit. hlm. 89.

Terpimpin (1959-1965)”. Pemilihan topik ini didasari oleh beberapa dasar pemikiran diatas bahwa politik, sosial, hukum dan militer itu saling berdampingan.

2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik merupakan kegiatan pengumpulan sumber yang diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.¹⁵ Pada dasarnya sumber sejarah terdiri dari tiga macam sumber. Pertama sumber benda (artifak) dapat berupa foto-foto, alat-alat atau bangunan sedapat mungkin bangunan asli. Kedua, sumber lisan yang berperan dalam mengembangkan substansi penulisan sejarah. Ketiga, sumber tertulis dapat berupa surat-surat, notulen, rapat, kontrak kerja, dan sebagainya.

Sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965” ini diperoleh melalui penelusuran pustaka. Sumber-sumber yang dipilih kemudian dikategorikan sifatnya, sebagai berikut:

a) Sumber Primer

Menurut Louis Gottschalk sumber primer adalah kesaksian seorang dengan mata kepalamya sendiri atau dengan alat mekanis yang selanjutnya disebut saksi pandangan mata.¹⁶ Sedangkan menurut Nugroho Notosusanto, sumber primer merupakan sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung dari orang yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri.

¹⁵Louis Gottschalk. *Understanding History: A Primer Of Historical Method.* a.b Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah.* Jakarta: UI Press. 1986, hlm. 34.

¹⁶*Ibid*, hlm. 94.

Sebagai sumber sejarah, sumber inilah yang harus dikejar karena paling valid dan reliable. Klasifikasi sumber primer adalah manuskrip, arsip, surat-surat, buku harian, dan lain sebagainya. Adapun sumber primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

Kepolisian Negara. (1947). *Sekolah Kepolisian Negara*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Presiden. (1959). *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 437/M Tahun 1959*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Presiden.(1959). *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 473/M Tahun 1959*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Presiden. (1960). *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3/M Tahun 1960*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Marzuki Arifin. (1949) *Negara Islam Indonesia (Darul Islam)*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

_____. (1962). *Irian Barat*. Kokonao: Arsip nasional Republik Indonesia.

Peraturan Sementara Menteri. (1961). *Susunan Departemen Kepolisian No. 7/PRT/M.K./1961*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Menteri. (1962). *Surat Keputusan Menteri/Kepala Kepolisian Negara No. Pol. 14/7/62/M.K.K.N*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

b) Sumber Sekunder

Menurut Nugroho Notosusanto, sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh oleh pengarang dari orang lain atau sumber lain.¹⁷ Adapun sumber sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

Adrianus Meliala. (2001). *Mengkritisi Polisi*. Yogyakarta: Kanisius.

¹⁷Nugroho Notosusanto. *Norma-Norma Dasar Pemikiran dan Penelitian*. Jakarta: Dephan. 1971, hlm. 30.

Awaloedin Djamin. (2007). *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI.

Dahana.(2012). *Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 7*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Direktorat Personil Markas Besar Kepolisian Negara R.I. (1987). *Biografi Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara R.I.

Erna Yulihastin. (2008). *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.

Memet Tanumidjaja. (1971). *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan.

Mochtar Lubis. (1988). *Citra Polisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sayidiman Suryohadiprojo. (1981). *Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang*. Jakarta: Intermasa.

Soepamo. (1871). *Sejarah Perkembangan Kepolisian Jaman Klasik-Modern*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.

Sundhaussen. (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI*. Jakarta: LP3JES

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber merupakan uji keabsahan sumber yang telah didapat.

Verifikasi ada dua macam, yaitu kritik intern dan kritik eksternal.¹⁸ Kritik sumber bertujuan menghindari kepalsuan sumber, yang mana sumber yang digunakan kebanyakan sumber sekunder. Dengan demikian peneliti melakukan pemilihan sumber dengan cermat dan maksimal supaya mendekati kebenaran.

a) Kritik eksternal :Otentitas dan Integritas

¹⁸Ibid, hlm. 99.

Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar sumber sejarah. Sebelum semua kesaksian yang berhasil dikumpulkan oleh sejarawan dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, maka terlebih dahulu harus dilakukan penyeleksian yang ketat.

b) Kritik Internal

Kritik Internal dapat ditempuh dengan mengadakan penelitian intrinsik terhadap sumber-sumber yang didapat dan membandingkan data yang didapat. Langkah ini baru dilaksanakan setelah kritik eksternal selesai untuk menentukan bahwa dokumen yang kita peroleh merupakan dokumen yang kita cari relevan dengan topik yang disusun lebih penting lagi bahwa sumber-sumber itu adalah sumber otentik.¹⁹

4. Interpretasi

Interpretasi merupakan proses menafsirkan data-data yang didapat dari sumber-sumber sejarah. Penafsiran dilakukan dengan melakukan analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan fakta, dan sintesis berarti menyatukan fakta-fakta yang ada.

5. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Historiografi merupakan usaha untuk mensintesiskan data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penulis akan menuliskan hasil penelitian ini secara sistematis, dalam

¹⁹I Gede Widja. *Sejarah Lokal Suatu Pespektif dalam Pengajaran Sejarah*. 1989, hlm. 24.

beberapa bab yang saling berkaitan menjadi sebuah skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965”.

H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah pola pikir yang digunakan untuk memecahkan persoalan dalam penelitian. Pandangan yang semakin meluas terhadap peristiwa sekitar manusia sebagai hasil dari banyaknya data yang terkumpul, metode yang semakin efisien, serta terminologi-terminologi eksak dari cabang-cabang ilmu sosial menuntut agar ilmu sejarah menggunakan hasil yang diperoleh dari disiplin ilmu lain.²⁰

Penulisan skripsi “ Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965” ini menggunakan beberapa pendekatan., yaitu pendekatan politik, sosial, hukum dan militer.

1. Pendekatan Politik

Pendekatan politik merupakan bermacam-macam tindakan yang dilakukan dalam sistem guna mencapai tujuan.²¹ Menurut Kuntowijoyo pendekatan ilmu politik adalah pada gejala-gejala masyarakat, seperti pengaruh dan kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan concensus

²⁰Poespoprodjo. *Subjektifitas Dalam Historiografi*. Bandung: Remadja Karya. 1987, hlm. 1.

²¹Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia. 2008, hlm. 12.

rekruitmen dan perilaku kepemimpinan, masa dan pemilih, budaya politik, sosialisasi politik dan sebagainya.²²

2. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial dalam sejarah diperlukan untuk dapat menelaah berbagai peristiwa sejarah. Sejarah juga berperan dalam menjalankan aktivitas kolektif manusia pada masa lampau.

3. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada penetapan-penetapan ataupun peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku secara universal. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji Undang-undang keputusan presiden dan keputusan-keputusan pemerintah yang mengatur struktur organisasi lembaga kepolisian selain sebagai penegak hukum polisi juga memelihara keamanan dan ketertiban negeri .

4. Pendekatan militer

Pendekatan militer merupakan kebijakan mengenai pelaksanaan perang untuk menentukan baik buruk serta besar kecilnya potensi dan kekuatan negara. Dengan demikian aktivitas militer mengikuti aktivitas politik suatu negara.²³

²²Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*, op.cit. hlm. 172.

²³Sayidiman Suryohadiprojo. *Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang*. Jakarta: Intermasa. 1981, hlm. 66.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965” secara sistematis terdiri dari lima bab. Untuk memperjelas skripsi ini, maka penulis mem memberikan gambaran singkat tentang sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berisi latar belakang penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kajian Pustaka, Historiografi yang Relevan, Metode Penulisan, Pendekatan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum Kepolisian Republik Indonesia sebelum masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini penulis menjelaskan keorganisasian dan tugas maupun peran Kepolisian Negara pada masa sebelum Demokrasi terpimpin. Tugas dan peran tersebut meliputi operasi Kamdagri untuk menumpas pemberontakan sisa-sisa kolonial Belanda, pemberontakan DI/TII dan pemberontakan PRRI/Permesta.

Bab ketiga berisi penjelasan tentang gambaran umum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada masa transisi antara demokrasi parlementer dan pada awal masa demokrasi terpimpin yang diawali dengan akhir masa jabatan R.S Soekanto. Kemudian akan dilanjutkan dengan menjelaskan tentang P3RI (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia) dan Kekaryaan Polri. Selanjutnya dalam bab ini juga dijelaskan tentang pergantian Kepala Kepolisian, Lahirnya catur Prasetya 4 April 1961, Berlakunya peraturan gaji Polisi dan lahirnya doktrin tentang kepolisian, setra perkembangan pendidikan kepolisian pada masa demokrasi terpimpin.

Bab keempat berisi penjelasan tentang dinamika perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia masa Demokrasi Terpimpin. Pada bab ini penulis menjelaskan hal yang berkaitan dengan Lahirnya UU Pokok Kepolisian.kemudian juga dibahas mengenai Integrasi Polri ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam Bab empat juga dijelaskan tentang organisasi kepolisian yang menyangkut dengan status kepolisian, struktur organisasi, serta perubahan nama Mobiele Brigade menjadi Brigade Mobil (Brimob). Selain itu juga, dalam bab ini menjelaskan tentang perkembangan Sekolah Polisi Negara.

Bab kelima berisi berisi penjelasan tentang peran serta Kepolisian Negara dalam Operasi Kamdagri yaitu operasi terhadap DI/TII di Sulawesi dan Jawa Barat. Kemudian dalam bab ini juga akan digambarkan fungsi maupun peran serta Kepolisian Negara dalam operasi Trikora dan Dwikora serta ikut andilnya Polri dalam penumpasan G30S. dan kedudukan Polri sebagai aparat penegak hukum di Indonesia dan bertugas menegakkan hukum, menjaga keamanan negara dan mengayomi masyarakat.